

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pemasukan bagi negara adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib untuk negara yang dikenakan kepada Wajib Pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sehingga, Wajib Pajak harus taat dalam pembayaran pajak. Hal ini sangat penting karena pembayaran pajak berguna untuk membangun bangsa dan menunjang kemajuan negara Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Sumber pemasukan pajak dibagi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Masuk dan Bea Keluar, Cukai, Pajak Impor, dan Pajak Ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea atas Hak Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hiburan, dan Pajak Bahan Bakar.

Pajak merupakan suatu sektor terpenting dalam membiayai seluruh keperluan negara guna mewujudkan pembangunan Nasional untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Hal tersebut merupakan wujud realisasi fungsi finansial (*budgeter*) sebagai akibat masuknya uang ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Tidak hanya itu pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*regulerend*) yakni penerimaan dari sektor pajak juga digunakan untuk mengatur masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Seiring dengan perkembangan IPTEK dan era globalisasi terutama sektor bisnis di Indonesia saat ini berdampak pada penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, terlihat pada tahun 2015 sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan telah mencapai Rp 1.235,8 triliun atau 83,0 persen dari target dalam APBN-P tahun 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun (www.kemenkeu.go.id).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Penghasilan merupakan salah satu bagian dari pajak pusat. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau

diperolehnya dalam tahun pajak, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut sebagai UU PPh.

Dalam UU PPh pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. orang pribadi
- b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- c. badan
- d. bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek pajak dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri sesuai dengan UU PPh pasal 2 ayat (3) huruf b adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, terdapat dalam UU PPh pasal 4 ayat (1).

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri, Wajib Pajak badan dan BUT (Bentuk Usaha Tetap) atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh pasal 23 yang dipotong oleh pemotong pph harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotong pajak penghasilan pasal memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh pasal 23 ke kas Negara atas PPh pasal 23 yang dipotong dari penerimaan penghasilan. Terhadap penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada pihak yang dipotong, bukti potong PPh pasal 23 ini adalah sebagai bukti pelunasan PPh terhutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan di kreditkan dalam SPT tahunannya.

1.2 Tujuan Studi Lapangan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam studi lapangan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa pelayanan pada CV Vidya Karya Persada.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Dengan harapan bahwa data dan informasi yang didapat melalui proses studi lapang dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca tulisan saya, dengan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri

Manfaat penelitian ini bagi penulis agar dapat lebih memahami, mengerti, dan mengetahui secara langsung, serta dapat mengetahui secara lebih rinci yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PPh 23 atas jasa pelayanan pada CV Vidya Karya Persada, dan penulis juga dapat menerapkan hasil dari pembelajaran selama di perkuliahan dalam dunia kerja yang sesungguhnya

2. Bagi CV Vidya Karya Persada

Untuk dijadikan masukan dan tambahan informasi bagi pihak CV Vidya Karya Persada untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal PPh pasal 23 atas jasa, sehingga dapat menghindarkan CV Vidya Karya Persada dari kerugian karena pembayaran pajak yang semakin lama semakin tinggi yang di tanggungan kepada perusahaan-perusahaan seperti CV Vidya Karya Persada

3. Bagi pihak lain yang membaca

Dalam studi lapang ini saya bertujuan untuk memberikan informasi agar dapat diketahui bagaimana penerapannya di lapangan, agar pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat melihat dan mempertimbangkan apakah peraturan perpajakan yang sudah ada dapat menguntungkan dan mempermudah pihak pengusaha lokal atau malah dapat mempersulit pengusaha local.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan penulis agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan dengan berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas, ruang lingkup masalah yang akan dikaji adalah pelaksanaan PPh 23 atas jasa CV Vidya Karya Persada

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi:

1. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan secara langsung melakukan pengamatan pada tempat praktek kerja, secara teliti dan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi kesalah pahaman.
2. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara langsung bertanya kepada pembimbing ditempat praktek kerja lapangan atau lakukan agar disebut narasumber, ini dilakukan untuk mendapat infotmasi data yang jelas dan tepat.
3. Dokomentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meminta data dari perusahaan/tempat praktek kerja lapangan agar dapat dipergunakan sebagai contoh untuk memperkuat data yang sudah diperoleh melalui cara di atas.